

Investigasi Pengaruh Komposisi Dewan dan Konsentrasi Kepemilikan Pada Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan



Citrawati Jatiningrum^{1*}, Fauzi², Bernadhita H. S Utami³

^{1,2,3} *Jurusan Sistem Informasi, STMIK Pringsewu Lampung Indonesia*

¹citrawati1980@gmail.com, ²drfauzistmikpsw@gmail.com, ³ind.indri1245@gmail.com

*Penulis koresponden

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Tanggal submit:
13 Desember 2021

Tanggal revisi:
26 Januari 2022

Tanggal diterima:
27 Januari 2022

Keywords:

board composition; ownership concentration; agency conflict type II; disclosure quality

Crucial issues in Asia occur when modern companies are majority owned by large shareholders and effectively control the company. This phenomenon lead to type II agency conflict, which is conflict between the majority shareholder and the minority shareholder. This study aims to investigate the effect of the board composition and concentrated ownership on the disclosure quality of financial statement. The samples study selected are companies in Indonesia with concentrated ownership. Using multiple regression analysis method result reveal that the concentration of ownership has a negative effect on the disclosure quality, while the board composition has a significant positive effect. However, independent commissioners have no influence on the disclosure quality This finding can be consideration for regulators and policy makers for improving good corporate governance and review the disclosure requirements of financial statements as a form of protection for minority shareholders.

1. PENDAHULUAN

Konflik keagenan telah berkembang menjadi isu penting dalam literatur corporate governance. Konflik keagenan utama menyimpulkan ada konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemangku kepentingan sebagai prinsipal disebut sebagai konflik keagenan tipe I (Jensen & Meckling, 1976; Porta et al., 2000). Akibatnya, secara

oportunistik manajer dapat bertindak untuk tujuan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam hal ini konflik keagenan utama umumnya muncul pada struktur kepemilikan yang tersebar dan terjadi pada negara yang memiliki perlindungan investor ((Porta et al., 2000)). Berdasarkan bukti kajian sebelumnya pada beberapa negara yang berada di Asia dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi akan memunculkan konflik keagenan yang berbeda, yaitu antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, disebut sebagai konflik keagenan Tipe II. Fokus pada konflik keagenan ini ialah pemegang saham mayoritas atau pengendali dan pemegang saham minoritas (Shleifer & Vishny, 1997); (Faccio & Lang, 2002); (Ali, 2014); (Jatiningrum et al., 2016), (Jatiningrum et al., 2020)).

Relevansi konflik keagenan dengan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) sangat erat (Jensen & Meckling, 1976); (Zhuang et al., 2001)). La Porta et al., (2000) menunjukkan bahwa *corporate governance* merupakan satu set mekanisme dimana investor luar melindungi diri mereka sendiri terhadap pengambilalihan oleh orang dalam. Oleh karena itu, mekanisme *good corporate governance* bertujuan melindungi pemegang saham minoritas oleh manajer atau pemegang saham pengendali dan melengkapi regulasi untuk melindungi pemegang saham minoritas (Mitton, 2002); (Ali, 2014); (Rizki & Jasmine, 2018), (Hasan et al., 2019). Shleifer & Vishny, (1997) & Jatiningrum et al., (2016) mendefinisikan perusahaan dengan kategori kepemilikan terkonsentrasi ialah perusahaan dengan pemegang saham utama memiliki lebih dari 51% kepemilikan saham. Ho & Wong, (2001) berpendapat bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi, konflik kepentingan bukanlah antara pemegang saham dan manajer tetapi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dalam situasi konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, manajer dimanipulasi oleh pemegang saham mayoritas untuk bertindak melawan kepentingan pemegang saham minoritas melalui penyembunyian informasi. La Porta et al., (2000) menjelaskan bahwa selama krisis keuangan, tata kelola perusahaan menjadi lebih penting karena dua alasan. Pertama, selama krisis keuangan, terjadinya pengambilalihan pemegang saham minoritas mungkin lebih parah. Kedua, dalam krisis keuangan, investor mungkin dipaksa untuk mengambil tindakan terhadap kelemahan tata kelola perusahaan. Karena alasan ini, perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah mungkin kehilangan nilai yang relatif lebih besar selama krisis. Oleh karena itu, kehadiran pemegang saham besar akan membawa perubahan pada masalah tata kelola

(Singla et al., 2014); (Rizki & Jasmine, 2018). Pemegang blok besar akan memiliki insentif untuk memantau para manajer. Fenomena ini membuktikan bahwa pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mengejar tujuan mereka, yaitu pengambilalihan pemegang saham minoritas (Singla et al., 2014).

Banyak penelitian sebelumnya melakukan kajian hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan laporan keuangan dalam konteks kepemilikan tersebar pada konflik keagenan Tipe I (Amoozesh et al., 2013); (Alshimmiri, 2004); (Satta et al., 2014); dan (Enache & Hussainey, 2020). Dalam hal ini, konflik keagenan tipe II juga merupakan faktor yang penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan karena konflik antara pemegang saham pengendali dan minoritas. Banyak penelitian untuk mengkaji CG di Asia telah dilakukan selama tahun 1998 hingga 2016. Salah satu penilaian paling komprehensif dari *Corporate Governance (CG) Watch* di Asia adalah CLSA diterbitkan dan menjadi tren di Asia yang diterbitkan setiap tahun sejak 2003. Penilaian tahun 2019 memeringkat 12 pasar utama Asia-Pasifik dan menunjukkan bahwa Singapura berada di peringkat teratas diikuti oleh Hong Kong, Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, India, Korea, Cina, Filipina, dan Indonesia. Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penerapan CG yang buruk dan rendah di antara negara-negara Asia Peringkat ini menunjukkan bahwa implementasi CG di Indonesia masih tertinggal sehingga membutuhkan langkah yang lebih cepat dan mungkin ditegakkan.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan tentang CG bagi perusahaan Indonesia yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan di negara-negara Asia yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga (Shleifer & Vishny, 1997); (La Porta et al., 2000); (Zhuang et al., 2001); (Singla et al., 2014)). Akibatnya, timbul konflik keagenan tipe II. (Singla et al., 2014) menyajikan hasil studi di negara berkembang seperti India, di mana mayoritas adalah perusahaan keluarga, studi mereka menyoroiti kebutuhan untuk mengenali efek dari pemegang blok yang berbeda pada hubungan internasionalisasi tata kelola dan menemukan bahwa perusahaan keluarga tidak dimodifikasi atau lemahnya tata kelola perusahaan.

Klapper & Love, (2004) berpendapat bahwa peningkatan “pengungkapan” (*disclosure*) adalah salah satu mekanisme untuk mencegah manajemen dan pemegang saham pengendali dari pengambilalihan pemegang saham minoritas. Alkurdi et al., (2019)

membandingkan perusahaan dengan tata kelola yang lebih lemah, mereka mendokumentasikan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik membuat pengungkapan publik lebih sering, pengungkapan kabar baik mereka adalah *timeline*. Konsisten dengan (Ali, 2014); (Din et al., 2021) menyatakan bahwa konflik keagenan yang utama dimana konsentrasi kepemilikan tinggi dengan proteksi rendah adalah konflik keagenan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol keluarga, saham dengan hak suara ganda, sentralisasi kekuasaan, dan kualitas pengungkapan. Peran *good corporate governance* dalam memperkuat kualitas pengungkapan di pasar negara berkembang Asia telah dibuktikan dalam beberapa penelitian seperti (Ali, 2014); (Amoozesh et al., 2013); Soheilyfar et al., (2014) dan (Jatiningrum et al., 2016). Hasil studi mereka tentang konsentrasi kepemilikan di negara-negara Asia masih tidak konsisten, dan hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan, terutama dalam komposisi dewan dan studi mengenai kualitas pengungkapan laporan keuangan di Indonesia masih sedikit.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan memiliki kelemahan yaitu mengabaikan konteks kepemilikan terkonsentrasi. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk mengatasi persoalan kontradiksi dan inkonsistensi berkaitan dengan *corporate governance* di konteks kepemilikan terkonsentrasi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar studi pada konteks kepemilikan tersebar seperti negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi komposisi dewan (ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan komisaris independen) dan konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas pengungkapan dalam konteks konflik keagenan Tipe II. Sampel studi dalam penelitian ini menggunakan konteks Indonesia sebagai salah satu negara dengan perusahaan mayoritas kepemilikan terkonsentrasi (Zhuang et al., 2001); (Jatiningrum et al., 2016)). Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada regulator dan pembuat kebijakan dalam implementasi *GCG (Good Corporate Governance)*.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Ukuran Dewan Komisaris dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasan et al., (2019) menemukan bahwa ukuran dewan yang besar lebih efektif karena harus berisi lebih banyak anggota dengan pengalaman dan pengetahuan yang

Investigasi Pengaruh Komposisi Dewan dan Konsentrasi Kepemilikan Pada Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan.

memungkinkan saran yang lebih baik. Senada dengan Hasan et al., (2019), Sembiring, (2005) dan Sulastini, (2007) berpendapat bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin baik kualitas pengungkapannya. Dalam studi relevan, Jatiningrum et al., (2016) memberikan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kualitas pengungkapan. Kontras dengan hasil penelitian Soheilyfar et al., (2014) yaitu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kualitas pengungkapan baik ukuran dewan dan masa jabatan ketua di sisi lain. Penelitian Arifah & Ma'mum (2014) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Hasilnya akan dikaitkan dengan beberapa kemungkinan alasan yang dapat membatasi pengaruh ukuran dewan pada pengungkapan tata kelola perusahaan. Misalnya, ketika perusahaan mengadakan pemilihan komisaris, kemungkinan besar dewan akan mengangkat satu orang untuk menjabat sebagai komisaris. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan tidak efektifnya fungsi dewan komisaris, karena komisaris akan mempertimbangkan kepentingannya. Dalam penelitian ini diusulkan agar ukuran dewan komisaris dapat secara efektif memantau manajemen terhadap keterbukaan informasi yang lebih besar. Oleh karena itu, hipotesis pertama adalah:

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan terkonsentrasi

Ukuran Dewan Direktur dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan

CEO akan memanipulasi pengumuman pengungkapan yang baik atau buruk tergantung pada apakah dia berencana untuk menjual, membeli, atau menahan saham. Senada dengan Alshimmiri (2004), McDonald & Westphal, (2013) berpendapat bahwa semakin besar anggota dewan dengan manajer yang terampil mampu memberikan pemantauan manajemen dan juga akan meningkatkan efisiensi dan sebaliknya. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan dewan direksi yang kecil tanpa manajer yang terampil akan mengungkapkan lebih sedikit data dalam laporan keuangan mereka. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara ukuran dewan direktur dan kualitas pengungkapan. Dengan kata lain, jumlah anggota dewan perusahaan dapat mempengaruhi keterbukaan informasi. Sebaliknya, hasil penelitian Soheilyfar et al., (2014) menunjukkan bahwa hubungan antara *corporate governance* dan kualitas pengungkapan tidak berhubungan secara signifikan dengan ukuran dewan direksi. Oleh karena itu, perusahaan

dengan jajaran direksi yang tinggi akan lebih banyak mengungkapkan dalam laporan keuangannya Hasan et al., (2019). Nawafly & Alarussi (2019) mendokumentasikan bahwa ukuran dewan memiliki dampak signifikan positif terhadap kualitas pengungkapan. Dengan demikian, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ukuran dewan direktur berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan terkonsentrasi

Komisaris Independen dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan

Dalam mekanisme GCG merekomendasikan bahwa jumlah anggota eksternal di dewan harus lebih tinggi daripada jumlah anggota internal untuk memantau kegiatan manajemen untuk memaksimalkan nilai organisasi (Correia et al., 2011) dan dewan independen memiliki dampak positif pada pengungkapan (Alkurdi et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, komisaris Independen adalah anggota dewan yang berasal dari independen atau di luar perusahaan publik (Yanti & Wijaya, 2019). Mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten, yang tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik. Hasil penelitian (Katmun, 2012) mengungkapkan terdapat pengaruh positif signifikan independensi dewan terhadap kualitas pengungkapan. Senada dengan Soheilyfar et al., (2014) juga menemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kualitas pengungkapan dan independensi ketua. Berbeda dengan Jatiningrum et al., (2016) mendokumentasikan bahwa kualitas pengungkapan memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan kualitas pengungkapan. Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis positif adalah:

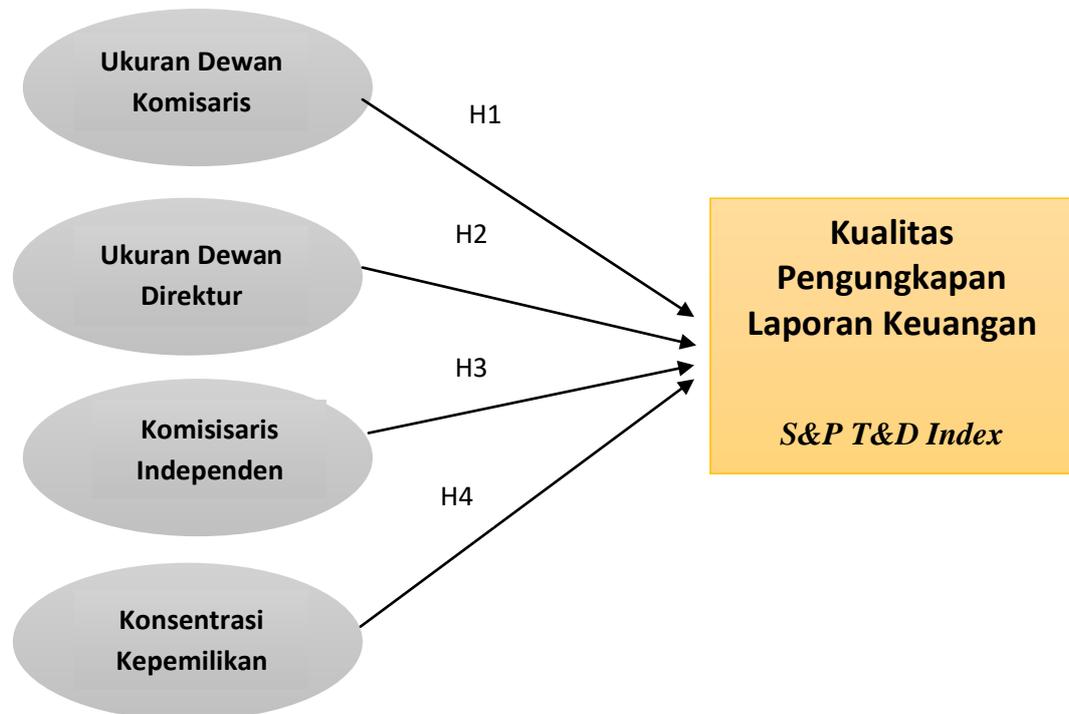
H3: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan terkonsentrasi

Konsentrasi Kepemilikan dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Komalasari, (2017) lebih lanjut menunjukkan bahwa ketika investor kurang terlindungi, pemegang saham pengendali memiliki lebih banyak motivasi untuk mengambil keuntungan dari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini dikarenakan adanya kedekatannya dengan aktivitas operasi, maka

pemegang saham pengendali dapat memperoleh informasi pribadi untuk menilai hasil investasi mereka dan mungkin enggan untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada publik untuk menghindari persaingan minoritas dan untuk terus mengambil alih pemegang saham lainnya. Pemegang saham pengendali mengklaim persentase hak suara yang tinggi, dan mereka kemudian dapat dengan mudah mengontrol perusahaan dan strategi pengungkapan mereka, yang dapat menyebabkan kualitas pengungkapan yang buruk. Chau & Gray (2002) menunjukkan bahwa di antara perusahaan Hong Kong dan Singapura, semakin banyak modal perusahaan tersebar, semakin banyak pengungkapan sukarela. Soheilyfar et al. (2014) menyelidiki hubungan antara kualitas pengungkapan dan beberapa mekanisme *corporate government* menggunakan perusahaan sampel di Bursa Efek Teheran (TSE). Mereka menemukan bahwa ada hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan dan kualitas pengungkapan. Mereka juga menemukan bahwa perusahaan dengan kontrol keluarga memiliki proporsi direktur luar yang rendah di dewan, kehadiran kepemilikan investor institusional yang rendah, tidak ada rencana opsi saham eksekutif, dan menyajikan saham kelas ganda. Didasarkan pada konflik keagenan tipe II, yang mendukung hubungan negatif antara kepemilikan terkonsentrasi, hipotesis pertama adalah:

H4: Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan terkonsentrasi



Gambar 1. Model Kerangka Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sampel

Data dikumpulkan dari laporan tahunan emiten Indonesia di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Sampel perusahaan dipilih dari populasi penelitian dengan menggunakan *purposive judgement sampling*. Jumlah sampel terpilih adalah 254 perusahaan dengan total observasi adalah 762 perusahaan selama 3 tahun pengamatan. Tata cara pemilihan sampel penelitian ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

Jumlah perusahaan yang konsisten tercatat di IDX	465*
Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan mayoritas (>51%)	(104)
Perusahaan tanpa kepemilikan mayoritas yang konsisten	(14)
Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan lembaga keuangan lainnya	(27)
Perusahaan yang memiliki kepemilikan pemerintah	(5)
Perusahaan dengan Laporan Keuangan tidak lengkap yang diterbitkan	(11)
Perusahaan Laporan Tahunan tidak lengkap yang diterbitkan selama pengamatan	(32)
Pelaporan lengkap digunakan dalam penelitian ini	(18)
<i>(ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, independen komisaris)</i>	
Jumlah sampel	254
<i>(Observasi 254 x 3 tahun)</i>	762

Kualitas Pengungkapan Laporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan *Standard & Poor's Disclosure Quality Index (S&P T&D Index)*. Indeks ini digunakan dalam penelitian sebelumnya di pasar negara berkembang yaitu negara-negara Amerika Latin dan Asia. Ada tiga subkategori, termasuk 1) Struktur kepemilikan dan hak investor (28 atribut), 2) Transparansi keuangan dan keterbukaan informasi (35 atribut), 3) Struktur dan proses dewan dan manajemen (35 atribut). Jumlah subkategori adalah 98 item. Semua item akan diperiksa oleh laporan tahunan perusahaan (Patel & Dallas, 2002). Penelitian ini menggunakan metodologi penilaian yang sama yang diadopsi dalam indeks S&P T&D ((Aksu & Kosedag, 2006), 2006; (Jatiningrum et al., 2016)). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$TDS = \sum_j \sum_k S_{jk} / TOTS$$

Keterangan:

- j = subskrip kategori atribut
 k = subskrip item info (atribut) dan

TOTS = total kemungkinan jawaban "ya" maksimum untuk setiap perusahaan
Sjk = jumlah item info yang diungkapkan (jawab sebagai "ya") oleh perusahaan di

Tabel 2. Variabel Penelitian, Definisi dan Proxy

Variabel	Proxy	Literatur
Dependen Variabel:		
<i>Kualitas Pengungkapan (DQ)</i>	Indeks pengukuran transparansi berdasarkan Transparency and Disclosure rank available on the Standard & Poor's.	(Patel & Dallas, 2002)
Independen Variable:		
• <i>Ukuran Dewan Direkstur (BOD)</i>	Jumlah dewan direktur pada keanggotaan dewan	(Ramachandran et. al., 2014) and Gonzalez & Gracia-Mecca, 2014).
• <i>Ukuran Dewan Komisaris (BCOM)</i>	Jumlah komisaris dalam keanggotaan Dewan	Suhendra & Wardani, 2013; Jatiningrum, et al, 2016, 2020)
• <i>Komisaris Independen (INCOM)</i>	Persentase komisaris independen atas jumlah anggota dewan	Suhendra & Wardani, 2013; Jatiningrum, et al, 2016)

Metode Analisis

Pengujian Hipotesis dilakukan menggunakan beberapa tahapan. Tahap pertama melakukan Uji Asumsi Klasik yaitu 1) pengujian normalitas data. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual variabel mengikuti distribusi normal. 2) pengujian heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi varians residual terjadi karena ketidaksamaan satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. 3) Pengujian autokorelasi untuk menguji apakah model regresi linier memiliki korelasi antara residual error pada periode t dengan residual error pada periode t-1 (sebelumnya). 4) Tahapan berikutnya pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda yang akan digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, H3, dan H4. Berikut ini formula pengujian hipotesis:

$$LN_DQ_{i,t} = \theta + \alpha_1 BCOM + \alpha_2 BOD + \alpha_3 INCOM + \alpha_4 OWNC$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 3 melaporkan statistik deskriptif untuk kualitas pengungkapan dan variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini. Pada bagian ini, statistik deskriptif untuk semua variabel ditampilkan minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Kualitas pengungkapan untuk perusahaan sampel selama periode penelitian bervariasi 0,54-0,86, dan rata-rata adalah 0,76. Hasil untuk variabel bebas menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah 99,99 untuk konsentrasi kepemilikan, yang berarti bahwa mayoritas struktur kepemilikan di Indonesia sangat terkonsentrasi. Namun, skor terendah adalah untuk independensi komisaris (0,16), diikuti oleh leverage (0,23) dan kualitas pengungkapan (0,54).

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>
<i>DQ</i>	762	0.54	0.86	0.76	0.14
<i>OWNC</i>	762	50.02	99.99	63.45	10.73
<i>BOD</i>	762	2.00	9.00	4.82	1.68
<i>BCOM</i>	762	1.00	11.00	5.76	2.81
<i>INCOM</i>	762	0.16	0.75	0.45	0.42
<i>Valid N (listwise)</i>	762				

Sumber: Data diolah

Uji normalitas berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa probabilitas normal dengan *Kolmogorov-Smirnov-Test* dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, seperti terlihat pada Tabel 4 dibawah ini yaitu dengan signifikansi > 0,05 atau 0,315.

Table 4 Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		762
Normal Parameters ^a	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.2611312
Most Extreme Differences	Absolute	0.038
	Positive	0.054
	Negative	-0.06
Kolmogorov-Smirnov Z		0.724
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.315

Sumber: Data diolah

Hasil Uji Regresi

Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan menggunakan metode pengujian regresi linear berganda.

Hasil yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa model regresi signifikan dan menjelaskan 35% hubungan antara kualitas pengungkapan dan variabel independen, dan ini menunjukkan bahwa model tersebut cukup spesifik. Koefisien Konsentrasi Kepemilikan, ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran perusahaan, dan usia perusahaan semuanya signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan koefisien Independen Komisaris dan leverage tidak signifikan.

Tabel 5. Hasil Pengujian Regresi

Independen Variabel		Beta	t- value	Sig (p-value)
Dependen Variabel: LN_DQ (Disclosure Quality)				
Constant	+	0.472	12.673	0.000***
BCOM	+	0.102	2.715	0.000***
BOD	+	0.197	2.728	0.000***
INCOM	+	0.205	1.068	0.001***
OWNC	-	-0.210	-3.184	0.001***
Adjusted R ²		35.2		
F-statistic		12.545		
P-Value (F Statistic)		0.000***		
N		762		

*, **, ***Statistical significance at the 10, 5 and 1 persen

Sumber: Data diolah

Pada Tabel 5 disajikan hasil pengujian hipotesis (H1) yaitu menunjukkan pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi. Model regresi menunjukkan nilai signifikansi 0,000*** yang lebih kecil dari alpha 0,05. Hasil tersebut mendukung hipotesis penelitian yang berarti bahwa semakin besar ukuran komisaris, semakin besar kemungkinan pengungkapan lebih banyak informasi yang mengarah ke tingkat kualitas pengungkapan yang tinggi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran dewan komisaris, akan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Temuan ini sejalan dengan (Sembiring, 2005) dan (Sulastini, 2007) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pula tingkat pengungkapannya. Demikian pula dengan temuan Khodadadi et al. (2010) dan Jatiningrum et al. (2016). Hasilnya berpendapat bahwa peningkatan tingkat ukuran dewan komisaris dapat meningkatkan nilai pengungkapan.

Hasil pengujian hipotesis (H2) mendukung hipotesis alternatif, yaitu ukuran dewan direktur berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Tingkat signifikansi 0,000*** lebih besar dari nilai alpha (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota Direksi maka akan meningkatkan tingkat keterbukaan dan kualitas informasi. Hasil ini konsisten dengan Hasan et al., (2019) dan Jatiningrum et al. (2016). Dengan demikian, agar dewan direksi mengungkapkan lebih banyak informasi, maka dewan mungkin perlu terdiri dari anggota yang merupakan manajer terampil dengan pengalaman berbeda yang dapat meningkatkan efisiensi pengungkapan informasi.

Tabel 5 memuat hasil pengujian hipotesis (H3). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh tingkat signifikansi regresi sebesar 0,001*** untuk Komisaris independen terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikannya. Dengan demikian, dengan meningkatnya independensi komisaris, pengungkapan informasi keuangan perusahaan dapat ditingkatkan dan oleh karena itu menunjukkan tingkat transparansi yang lebih besar dalam laporan mereka. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Katmun (2012) bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara independensi dewan dan kualitas

pengungkapan serta temuan Soheilyfar et al. (2014) yang juga mengungkapkan hubungan yang signifikan dan positif antara kualitas pengungkapan dan independensi ketua.

Konsentrasi Kepemilikan dalam pengujian (H4) menunjukkan bahwa memiliki pengaruh dengan tanda negatif yang diharapkan. Bukti ini menunjukkan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan pemegang saham, semakin rendah kualitas keterbukaan informasi dengan perlindungan investor yang kurang dan sistem tata kelola perusahaan yang lemah. Hasil ini sesuai dengan temuan Ali (2014) dan Jatiningrum et al. (2016). Ukuran Dewan Direksi signifikan dengan tanda negatif yang diharapkan. Temuan ini bertentangan dengan beberapa ahli teori yang percaya bahwa berdasarkan hipotesis pemantauan aktif, sementara perusahaan dengan keberadaan investor institusional dan pemangku kepentingan yang sangat mengendalikan (konsentrasi kepemilikan) akan mengurangi biaya keagenan dengan mengurangi asimetri informasi. Studi ini memberikan bukti empiris mengenai ekspropriasi minoritas. Dalam konteks konflik keagenan Tipe II, keberadaan kepemilikan terkonsentrasi bertentangan dengan teori dan beberapa penelitian sebelumnya dalam konteks negara berkembang dengan baik dan perlindungan investor yang tinggi.

Pembahasan

Pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, kontrol keluarga terbukti secara empiris umumnya terjadi di antara perusahaan publik di seluruh dunia. Porta et al. (2000) mendokumentasikan bahwa sekitar 30% perusahaan di seluruh dunia adalah milik keluarga. Di Amerika Serikat, perusahaan keluarga menyumbang 33% dan 46% dari indeks Standard and Poor (S&P) 500 dan 1500 perusahaan, masing-masing. Demikian juga, lebih dari 44% perusahaan besar dikendalikan oleh keluarga di Eropa Barat, sementara perusahaan keluarga naik menjadi dua pertiga di Asia Timur (Faccio & Lang, 2002). Literatur empiris berkaitan dengan konflik keagenan tipe II mengungkapkan bahwa beberapa penelitian, melaporkan hubungan yang positif antara kepemilikan keluarga dan kinerja perusahaan, dan menyimpulkan bahwa perusahaan keluarga mengungguli perusahaan non-keluarga (Villalonga & Amit, 2006). Bukti empiris hasil dari penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Maury (2006) yang menyimpulkan bahwa keluarga kontrol dapat merugikan pemegang saham minoritas karena risiko pengambilalihan ketika transparansi rendah. Perbedaan dalam temuan dapat dikaitkan

dengan perbedaan dalam perusahaan keluarga (Villalonga dan Amit,2006a), tingkat perlindungan pemegang saham (Maury, 2006), keluarga yang terlibat dalam pemerintahan, pengambilan sampel teknik dan metodologi yang diterapkan (Miller et al., 2007). Di negara-negara Asia, termasuk Indonesia yaitu mayoritas perusahaan publik berukuran besar akan memiliki dewan direksi yang terdiri dari keluarga anggota dan teman dekat, membantu perusahaan untuk menghasilkan pengembalian yang lebih baik dan mengurangi biaya agensi karena efek pengelolaan manajemen.

5. KESIMPULAN

Studi ini menginvestigasi pentingnya kualitas pengungkapan dalam konteks perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian ini menghadirkan bukti baru di lingkungan dengan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi, perlindungan investor yang kurang, dan implementasi. Temuan utama menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan pengungkapan. Komposisi dewan, ukuran dewan komisaris dan komisiaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan. Temuan ini akan mengarah untuk mempertimbangkan pengambilalihan minoritas dengan meningkatkan perlindungan investor dan meningkatkan kualitas pengungkapan yang memaksimalkan manfaat dari pelaporan keuangan sebagai sarana penting untuk mengurangi konflik keagenan. Di sisi lain, penelitian ini akan membantu regulator untuk menetapkan seperangkat aturan pengungkapan yang tepat dan dengan semikian semakin kuat sistem CG dan pemantauan yang tepat, semakin besar kemampuan untuk berdampak pada manajemen perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak dan memberikan informasi keuangan yang lebih baik di perusahaan. masa depan.

6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi peningkatan penerapan GCG di Indonesia. Perlindungan Investor minoritas dan implementasi *Corporate Governance* merupakan isu yang penting di negara yang memiliki kepemilikan perusahaan mayoritas terkonsentrasi, contoh: Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya. Hasil studi ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan dan regulator di Indonesia tentang konteks konsentrasi kepemilikan serta di negara-negara Asia Timur lainnya keterbatasan penelitian ini adalah pengukuran variabel kualitas pengungkapan menggunakan indeks

pengungkapan (*Standard & Poor's*), karena kurangnya indeks yang tersedia terkait pengungkapan untuk perusahaan yang terdaftar di BEI. Studi ini juga tidak mempertimbangkan item pengungkapan yang relevan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Saran penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian menggunakan pengukuran *disclosure* yang lebih baik dan berbeda dengan studi ini, yaitu menggunakan indeks yang telah tersedia atau menggunakan list pengungkapan OJK tahun 2020 atau Indeks pengungkapan Kompas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksu, M., & Kosedag, A. 2006. Transparency and disclosure scores and their determinants in the Istanbul Stock Exchange. *Corporate Governance: An International Review*. Vol. 14(4): 277-296.
- Ali, C. Ben. 2014. Corporate governance, principal-principal agency conflicts, and disclosure. *Journal of Applied Business Research (JABR)*. Vol. 30(2): 419-432.
- Alkurdi, A., Hussainey, K., Tahat, Y., & Aladwan, M. 2019. The impact of corporate governance on risk disclosure: Jordanian evidence. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Vol. 23(1): 1-16.
- Alshimmiri, T. 2004. Board composition, executive remuneration and corporate performance: the case of REITS. *Corporate Ownership and Control*. Vol. 2(1): 104-118.
- Amoozesh, N., Moeinfar, Z., & Mousavi, Z. 2013. Evaluation of the relationship between disclosure quality and corporate governance quality in Tehran stock exchange. *Journal of Marketing and Business Research*. Vol. 2(1): 016-022.
- Arifah, D., & Ma'mum, M. 2014. Exploring Corporate Governance Disclosure Factors On Banking Industries In Indonesia Stock Exchange. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Vol. 4(2): 23-29.
- Chau, G. K., & Gray, S. J. 2002. Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore. *The International Journal of Accounting*. Vol. 37(2): 247-265.
- Correia, L. F., Amaral, H. F., & Louvet, P. 2011. Umndice de avaliação da qualidade da governança corporativa no Brasil. *Revista Contabilidade & Finanças*. Vol. 22(55): 45-63.
- Din, S. U., Khan, M. A., Khan, M. J., & Khan, M. Y. 2022. Ownership structure and corporate financial performance in an emerging market: a dynamic panel data analysis. *International Journal of Emerging Markets*. Vol. 17(8):1973-1997.
- Enache, L., & Hussainey, K. 2020. The substitutive relation between voluntary disclosure and corporate governance in their effects on firm performance. *Review of Quantitative Finance and Accounting*. Vol. 54(2): 413-445.
- Faccio, M., & Lang, L. H. P. 2002. The ultimate ownership of Western European corporations. *Journal of Financial Economics*. Vol. 65(3): 365-395.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gonzalez, J. S. & G.-M. E. 2014. *Does Corporate Governance Influence Earnings Management in Latin American Markets ?* Vol.121 (3): 419–440.
- Hasan, S., Jatiningrum, C., Fauzi, F., & Abdul-Hamid, M. A. 2019. The Moderating Effect of Audit Quality on Audit Committee and Financial Reporting Quality in Malaysia. *At Meliá Kuala Lumpur, Malaysia: 4th International Conference on Social Sciences Research*. Vol. 35 (19): 2899-2921
- Ho, S. S. ., & Wong, K. . 2001. A study of corporate disclosure practices and effectiveness in Hong Kong. *Journal of International Financial Management and Accounting*. Vol. 12(1): 75-101.
- Jatiningrum, C., Abdul-Hamid, M. A., Irviani, R., & Gumanti, M. 2016. Disclosure quality and corporate governance mechanisms: Evidence from concentrated ownership structure in Indonesia. *Proceeding Social Science and Economics International Conference*.
- Jatiningrum, C., Fauzi, Irviani, R., Mujiyati, & Hasan, S. 2020 . An investigation on the effect of audit committee on financial reporting quality in pre and post ifrs adoption: evidence from Malaysian companies. *Humanities & Social Sciences*. Vol. 8(2): 25-35.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3(4): 305-360.
- Katmun, N. 2012. *Disclosure quality determinants and consequences*. Thesis. Durham University.
- Khodadadi, V., Khazami, S., & Aflatooni, A. 2010. The effect of corporate governance structure on the extent of voluntary disclosure in Iran. *Business Intelligence Journal*, Vol. 3(2): 151-164.
- Klapper, L. F., & Love, I. 2004. Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. *Journal of Corporate Finance*. Vol. 10(5): 703-728.
- Komalasari, A. 2017. *Implementation the International Financial Reporting Standards as a moderating variable of the relationship of corporate governance with earnings management*. Vol. 20. (3A): 259-277
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. 2000. Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*. Vol. 58(12): 3-27.
- Maury, B. 2006. Family ownership and firm performance: Empirical evidence from Western European corporations. *Journal of Corporate Finance*. Vol. 12(2): 321-341.
- McDonald, M. L., & Westphal, J. D. 2013. Access denied: Low mentoring of women and minority first-time directors and its negative effects on appointments to additional boards. *Academy of Management Journal*. Vol. 56(4): 1169-1198.
- Miller, J. P., de Rafael, E., & Roberts, B. L. 2007. Muon (g- 2): experiment and theory. *Reports on Progress in Physics*. Vol. 70(5): 795.
- Mitton, T. 2002. A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis. *Journal of Financial Economics*. Vol. 64(2): 215-241.
- Nawafly, A. T., & Alarussi, A. S. 2019. Impact of Board Characteristics, Audit Committee Characteristics And External Auditor on Disclosure Quality of Financial Reporting. *Journal of Management and Economic Studies*. Vol. 1(1): 48–65.
- Patel, S., & Dallas, G. 2002. *Transparency and disclosure: Overview of methodology and study results-United States*. Available at SSRN 422800.

- Porta, R. La, Lopez-de-silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. 2000. *Investor protection and corporate governance*. Vol. 58(2000): 3–27.
- Ramachandran, J. 2014. *Does Corporate Governance Influence Earning Management? The Journal of Developing Areas*. Vol.49 (3): 263-274
- Rizki, A., & Jasmine, A. 2018. Investor Protection, Corporate Governance, Firm Value: Research on the Companies in Asia. *KnE Social Sciences*. Vol.2018(1): 547-565
- Satta, G., Parola, F., Profumo, G., & Penco, L. 2014. Corporate governance mechanisms and disclosure in medium-sized listed firms: substitutes or complements? *International Journal of Globalisation and Small Business*. Vol. 6(1): 37-63.
- Sembiring, E. 2005. Characteristics of corporate and social responsibility disclosure: study empirical companies listed on the JSE. *Accounting National Symposium VIII. Solo* 379-395.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. 1997. A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*. Vol. 52(2): 737-783.
- Singla, C., Veliyath, R., & George, R. 2014. Family firms and internationalization-governance relationships: Evidence of secondary agency issues. *Strategic Management Journal*. Vol. 35(4): 606-616.
- Soheilyfar, F., Tamimi, M., & Ahmadi, M. 2014. Disclosure Quality and Corporate Governance: Evidence from Iran. *Asian Journal and Finance and Accounting*. Vol. 6(2): 75-85.
- Sulastini, S. 2007. *The effect of company characteristics to social disclosure at goes public manufacturing companies*. Skripsi. State of Semarang University.
- Villalonga, B., & Amit, R. 2006. Benefits and costs of control-enhancing mechanisms in US family firms. *ECGI WP Series in Finance*. Vol. 209 :207-216.
- Yanti, L. D., & Wijaya, M. D. 2019. Influence Of Auditor Switching, Audit Fee, Tenure Audit, and Company. *ECo-Fin*. Vol. 2(1): 152-158.
- Zhuang, J., Edwards, D., Capulong, M. V. A., & others. 2001. *Corporate Governance & Finance in East Asia: A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines and Thailand*. Asian Development Bank.

